



## **PELINTIRAN KEBENCIAN (*HATE SPIN*): Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian Melalui Identitas Agama dan Etnik di Kalimantan Barat**

**Ismail Ruslan**

IAIN Pontianak, Indonesia

Email: [ismailruslan@yahoo.com](mailto:ismailruslan@yahoo.com)

*Diterima tanggal: 16 Desember 2020*

*Selesai tanggal: 31 Desember 2020*

### **ABSTRACT**

*Hate speech cases in West Kalimantan are increasing from year to year. Especially in the momentum of the democratic party, the election of the Provincial or City District Representatives Council (DPRD), the Governor to the Regent. Hate speech perpetrators use social media to publish their content. In its development, related to the momentum of the Pilkada, hate speech also uses religious and ethnic issues. The use of identity politics, such as religion and ethnicity, is an important issue in the battle for regional heads in West Kalimantan. Political events with religious backgrounds in other regions also vibrate and disturb disturbances in the West Kalimantan region, such as the contestation of the DKI Jakarta Regional Election which is thick with religious and ethnic issues. These two issues have always been a magnet for politicians to gain support from local political rivalries. The strategy of insulting and feeling humiliated is a dual technique of political prohibition. It is called hate spinning.*

Kasus ujaran kebencian di Kalimantan Barat meningkat dari tahun ke tahun. Terlebih pada momentum pesta demokrasi, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Kabupaten Kota, Gubernur hingga Bupati. Pelaku ujaran kebencian menggunakan media sosial untuk mempublikasi kontennya. Dalam perkembangannya, terkait dengan momentum Pilkada, ujaran kebencian juga menggunakan isu agama dan etnik. Penggunaan politik identitas, seperti agama dan etnik menjadi isu penting dalam pertarungan kepala daerah di Kalbar. Peristiwa politik dengan *background* agama di daerah lain juga terasa getarannya dan mengganggu stabilitas di wilayah Kalimantan Barat, seperti kontestasi Pilkada DKI Jakarta yang kental isu agama dan etnik. Kedua isu ini, selalu menjadi magnet para politisi untuk meraih dukungan rivalitas politik local. Strategi menghina dan merasa terhina merupakan teknik ganda dalam pertarungan politik. Inilah yang disebut pelintiran kebencian (*hate spin*).

*Keynote:* Pelintiran kebencian, politik identitas, agama, etnik.

### **PENDAHULUAN**

Beberapa tahun belakangan ini, kondisi batin sebagian masyarakat Kalimantan Barat diselimuti perasaan kebencian, saling curiga dan permusuhan.

Terlebih pada saat pesta demokrasi, seperti pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018, dan memasuki puncaknya pada proses pemilihan presiden dan legislatif tahun 2019. Pelintiran

kebencian dengan rekayasa ketersinggungan, ujaran kebencian, berita hoax, fitnah, caci maki, dan pencemaran nama baik menjadi menu setiap hari. Hal ini terjadi melalui media sosial, seperti *facebook*, *Instagram*, *WhatsApp* dan media online lainnya. Lebih memprihatinkan lagi, sebagian besar masyarakat percaya dan terpedaya oleh pelintiran tersebut<sup>1</sup>; <sup>2</sup>.

Penggunaan media online yang semakin tinggi di Indonesia, salah satunya berdampak pada meningkatnya *hatespeech* (ujaran kebencian). Peningkatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat. Penelitian Cristiany Juditha, menunjukkan bahwa beberapa konflik yang terjadi antara kelompok agama disebabkan oleh informasi di media online yang cenderung provokatif<sup>3</sup>.

Kalangan politisi, birokrat, akademisi, mahasiswa dan masyarakat terpolarisasi atas dasar kelompok politik identitas (etnik dan agama). Hal ini terjadi tidak hanya di kota besar seperti Jakarta,

Bandung, Surabaya, Semarang, Makasar, namun juga seperti *dicopy-paste* oleh daerah-daerah lainnya, seperti Kalimantan Barat. Polarisasi politik identitas yang menggunakan isu etnik dan agama pada saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta juga terasa getarannya di Kalimantan Barat. Masyarakat DKI yang diselimuti perasaan kebencian, permusuhan atas latar belakang etnik dan agama menular ke Kalimantan Barat. Lebih memprihatinkan lagi, pada setiap peristiwa politik lima tahunan itu, masyarakat di Kota Khatulistiwa ini larut dalam euforia kemenangan calonnya dengan mengusung jargon-jargon etnik dan agama.

Kenyataan ini membenarkan apa yang diungkapkan oleh para pemerhati, seperti: <sup>4</sup>; <sup>5</sup>; <sup>6</sup> dan <sup>7</sup>, bahwa peristiwa politik di pusat pemerintahan Republik

<sup>4</sup> Ahmad Muhaimin; Junaidi, "Fiqh Santri Dan Politisasi Agama Dalam Bingkai Otonomi Kesatuan," *Jurnal Dakwatuna: Dakwah Dan Komunikasi Islam* 3, no. 2 (2017): 121-46, <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/dakwatuna/article/view/280>.

<sup>5</sup> Abdillah Halim, "Fatwa Dan Politisasi Agama (Analisis Wacana Penggunaan Fatwa Pada Pilkada DKI Jakarta)," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya & Sosial* Vol. 5, no. 2 (2018): 231-59, <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/272/108>.

<sup>6</sup> Budi Kurniawan, "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebeneran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi," *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 133, <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07>.

<sup>7</sup> Ferdinand Eskol Tiar Sirait, "Ujaran Kebencian, Hoax Dan Perilaku Memilih (Studi Kasus Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia)," *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 2 (2020): 179-90, [www.politik.lipi.go.id](http://www.politik.lipi.go.id).

<sup>1</sup> Dian Junita Ningrum, Suryadi Suryadi, and Dian Eka Chandra Wardhana, "KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL," *Jurnal Ilmiah KORPUS* 2, no. 3 (2019): 241-52, <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>.

<sup>2</sup> Linawati, "Tindak Tutur Ujaran Kebencian Dalam Komentar Pembaca Pada Surat Kabar Online Tribunnews.Com," *Bahasa Dan Sastra Indonesia - SI Universitas Negeri Yogyakarta* 6, no. 5 (2017): 606-14, <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/bsi>.

<sup>3</sup> Christiany Juditha, "Hatespeech Di Media Online: Kasus Pilkada Dki Jakarta 2017," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2017, 137-50.

Indonesia (DKI Jakarta) telah mengubah relasi masyarakat di wilayah lainnya.

Muhaimin (2017) melaporkan bahwa Pilkada DKI Jakarta telah berimbas terhadap pilkada di daerah lainnya. Meskipun pada awalnya daerah itu tidak memiliki sejarah konflik identitas, baik agama maupun budaya. Namun saat ini wilayah tersebut telah terpolarisasi menjadi dua bentuk pertentangan di tataran bawah. Dikuatkan pula oleh Kurniawan bahwa tahun politik di Indonesia tidak dapat dipungkiri diwarnai dengan politisasi agama, termasuk pilpres 2019. Dengan menggunakan sentiment etnisitas dan agama melalui wacana yang populis dan argumentasi informasi yang distortif demi menghidupkan daya legitimasi dalam rangka menunjang kepentingan politik (Kurniawan, 2018).

Setelah sekian lama mati suri, politisasi agama, khususnya politisasi Islam, kembali menyeruak ke ruang-ruang publik Indonesia. Rontoknya rezim Orde Baru menyebabkan bangkitnya kembali para petualang agama yang dulu sempat “dimumikan” oleh Suharto karena dianggap membahayakan stabilitas dirinya, cendana, dan kroninya. Ketika Suharto tak lagi berkuasa, mereka pun ber-euforia dan berpesta pora. Tak pelak, politisasi agama (Islam) yang cenderung berlebihan dan overdosis ini telah menimbulkan dampak

buruk bagi kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara di Tanah Air<sup>8</sup>.

Kemajuan dunia teknologi dan informasi turut mempercepat pengaruh informasi pelintiran dan ujaran kebencian seperti berita *hoax* tersebut. Berbagai peristiwa termasuk politik yang terjadi di ujung negeri dengan mudah diakses dan direspon oleh masyarakat di Indonesia (baca: Kalbar), di manapun berada.

Kontestasi Pilpres 2019 diwarnai dengan meluasnya penggunaan pelintiran dan ujaran kebencian, *hoax*, di mana salah satu medium terbesar penyebarannya adalah media sosial. Penggunaan media sosial dan berita daring sebagai medium kampanye negative dan hitam dikarenakan media sosial dan portal berita daring memiliki fitur-fitur yang sulit dikendalikan (Eskol 2019).

Bahkan suasana menjadi hiruk pikuk, dan riuh rendah, saat elit politik, pejabat publik Indonesia juga menggunakan isu etnik dan agama untuk kepentingannya, akibatnya masyarakat “terbelah” hingga masuk wilayah *private*.

Identifikasi Identitas etnik yang lazim dilakukan pada masyarakat multi etnik senantiasa diarahkan pada situasi dan konteks di mana seseorang berada. Dalam

---

<sup>8</sup> Sumanto Al Qurtuby, “Sejarah Politik Politisasi Agama Dan Dampaknya Di Indonesia,” *Maarif* 13, no. 2 (2018): 43–54, <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.21>.

konteks politik terutama pada lembaga seperti DPRD identifikasi identitas etnik menjadi hal penting dalam aktifitas politik. Identitas etnik adalah sesuatu yang problematik ketika dihadapkan dengan komunikasi politik, terutama dalam sistem pemilu yang demokratik<sup>9</sup>

Keterlibatan etnis memiliki pengaruh dalam hal untuk menjadi sumber suara. Hubungan identitas etnis menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan pemilih. Keberadaan kelompok-kelompok etnis mampu dimanfaatkan oleh pasangan calon untuk memperoleh dukungan politik<sup>10</sup>.

Dalam gelaran pemilihan Walikota Makassar tahun 2013, intensitas praktik penggunaan simbol identitas etnik pada media cukup tinggi. Simbol etnik yang digunakan diterbitkan dalam format iklan pada berbagai media. Praktik ini merupakan pembangunan relasi dan kekuasaan yang dirumuskan dengan kehadiran biopolitik<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Ilyas Lampe and Haslinda B. Anriani, "Stereotipe, Prasangka Dan Dinamika Antaretnik," *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 20, no. 1 (2016): 19–32, <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v20i1.42>.

<sup>10</sup> Ivan Devi Sagala and Budi Ali Mukmin Sarumpaet, "Politik Identitas Etnis Dalam Pilkada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2015," *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 4, no. 1 (2018): 139, <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10268>.

<sup>11</sup> E J Syaf, "Pertarungan Simbol Identitas Etnis Sebagai Komunikasi Politik Dalam Pilkada Kota

Dampaknya antara satu kampung dengan kampung yang lain saling membenci, mencaci hanya karena berbeda bendera etnik, agama, organisasi dan dukungan politik. Ada juga antara rukun warga atau rukun tetangga yang berbeda pilihan politik menutup diri dan mengisolasi tetangganya. Bahkan anak dengan orang tua harus bersitegang hanya persoalan beda pandangan keagamaan dan sikap politik.

Tudingan manusia kafir dan muslim juga menjadi bumbu ramainya perayaan demokrasi di Kalbar tahun 2018 dan pemilihan presiden tahun 2019. Sesama muslim saling klaim sebagai muslim sejati dan bagian yang lain dituduh sebagai kelompok kafir, dan tempatnya di neraka.

Potensi konflik identitas seperti ini lebih diwarnai menguatnya sikap primordialisme, yang berasal dari suasana batin dan psikologi keagamaan dan kesukuan yang diperkuat dengan ceramah "oknum" tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Testimoni (baca: provokasi) oknum tokoh agama tersebut mampu mempengaruhi psikologi masyarakat, yang "berpatron" dan menjadikannya referensi pandangan politik dan perilaku

Makassar," *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2018.

keagamaan. Psikologi masyarakat Kalimantan Baratsangat tunduk dan patuh pada keduanyadengan sepenuh jiwa dan raga mereka.

Posisi politik dan agama kadang berada dalam satu garis sejalan dan beririsan karena memiliki kepentingan dan nilai yang sama. Namun dalam beberapa kesempatan keduanya berhadap-hadapan, bersinggungan dan bersitegang. Hubungan di tengah-tengah agama dan politik adalah timbal balik karena ada konflik kepentingan antara kedua entitas<sup>12</sup>.

Namun permusuhan dan kebencian yang menyelimuti masyarakatsaat ini bukanlah lahir secara alami, apalagi agama, tokoh agama dan tokoh masyarakat dituduh sebagai biang yang menyebabkannya. Masa permusuhan, kebencian antara kelompok masyarakat tidaklah terjadi secara alamiah. Peristiwa tersebut merupakan hasil rekayasa canggih yang diproduksi oleh “wirausahawan politik” demi kepentingan strategis mereka. Strategi menghina dan merasa terhina merupakan teknik ganda dalam pertarungan politik, hal inilah yang disebut pelintiran kebencian (*hate spin*)<sup>13</sup>.

Selama ini agama dan tokoh agama selalu dijadikan pihak “tertuduh” terhadap persoalan konflik identitas etnik dan agama di masyarakat. Teks-teks agama disinyalir sebagai akar kekerasan. Demikian juga dengan tokoh agama, mereka dituduh selalu menyebarkan paham kebencian dan permusuhan. Kondisi ini menyadarkan kita bahwa suasana batin bangsa Indonesia penuh permusuhan saat ini adalah sebuah rekayasa demi kepentingan politik.

Pelintiran kebencian (*hate spin*) menggunakan kebebasan dan toleransi yang dijamin oleh demokrasi guna mendukung agenda yang menggerogoti nilai-nilai demokrasi itu sendiri (George, 2017). Negara demokrasi, seperti Indonesia, perlu serius merespon persoalan ini, melalui instrumen hukum, politik, media dan partisipasi masyarakat, agama dan budaya. Agen-egen pelintir kebencian memungkinkan membajak instrumen hukum melalui ketersinggungan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, tulisan ini mengkaji tentang pelintiran kebencian dengan membedah rekayasa ketersinggungan dan ujaran kebencian pada pesta demokrasi “Pemilukada di Kalimantan Barat Tahun 2018”.

---

<sup>12</sup> Wasisto Raharjo Jati, “AGAMA DAN POLITIK: TEOLOGI PEMBEBASAN SEBAGAI ARENA PROFETISASI AGAMA,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 133, <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.262>.

<sup>13</sup> Charian George, *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama Dan Ancaman Bagi*

---

*Demokrasi*, ed. Ihsan Ali-Fauzi; Irsyad Rafsadi (Jakarta: Pusad Paramadina, 2017).

## METODE PENELITIAN

Penelitian tentang pelintiran kebencian (*hate spin*) di Kalimantan Barat ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam persoalan pelintiran kebencian pada tahun 2017, dan selama proses politik pemilihan kepala daerah di Kalimantan Barat tahun 2018.

Peneliti ini telah mengamati berita-berita di media masa nasional maupun lokal tentang pelintiran kebencian (*hate spin*) dan juga ujaran kebencian (*hate speech*). Keduanya terjadi pada saat Proses pemilihan kepala daerah di Kalimantan Barat sebelum (2017) dan pada tahun 2018, hingga tahun 2019.

Data-data yang diperoleh di dalam penelitian ini bersumber dari pemberitaan media masa baik cetak, maupun online. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi validitas data antara satu media dengan media lainnya. Selain itu, peneliti juga melakukan kajian literatur atau teori untuk memperkuat landasan pemikiran yang terkait dengan persoalan pelintiran dan ujaran kebencian.

Untuk kepentingan memperkaya dan memperdalam kajian ini, maka peneliti juga melakukan diskusi dengan beberapa tokoh agama di Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pandangan,

pendapat, sikap politik keagamaan tokoh agama di Kalimantan Barat.

Peneliti relative lebih “mudah” memperoleh informasi, pandangan dan sikap politik tokoh-tokoh agama, karena pada saat yang sama, peneliti juga berposisi sebagai ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat. Sejak tahun 2018 selalu bersama tokoh agama dalam kegiatan perdamaian, kerukunan baik pada sesi diskusi, FGD, seminar dan kegiatan lainnya di Kalimantan Barat. Bahkan dalam beberapa kesempatan juga memperoleh informasi dari tokoh agama dari provinsi lainnya yang datang berkunjung dan berdiskusi di FKUB Kalimantan Kalimantan Barat.

Peneliti telah melakukan diskusi dan wawancara dengan tokoh agama di Kalimantan Barat yang berasal dari unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGIW), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Wali Umat Budha Indonesia (WALUBI), Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia (MATAKIN), Parishada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Tokoh-tokoh organisasi keagamaan ini tergabung di dalam Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) Kalbar.

Penelitian ini juga melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan

*Ismail Ruslan:*

PELINTIRAN KEBENCIAN (*HATE SPIN*):

*Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian Melalui Identitas Agama dan Etnik di Kalimantan Barat*

kalangan akademisi di Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi baik terkait data-data maupun kajian akademik tentang pelintiran dan ujaran kebencian di Kalimantan Barat, pada masa Pemilihan kepala daerah tahun 2018 maupun periode sebelumnya.

FGD ini sangat penting dilakukan di Perguruan Tinggi bersama para dosen untuk memperoleh informasi, dan pandangan civitas akademika khususnya IAIN Pontianak terhadap pelintiran dan ujaran kebencian.

Peneliti juga memperoleh data melalui FGD, kajian, seminar bersama organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aparat kepolisian dan TNI, Kementerian Agama, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Data-data yang diperoleh selama penelitian ini, membantu peneliti untuk melakukan analisis dengan prinsip-prinsip kualitatif. Peneliti mengumpulkan data-data lapangan dan melakukan analisis bersamaan dengan pengumpulan data tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data terbaru, dalam perkembangan politik daerah Kalimantan Barat tahun 2018. Dengan demikian, proses pengumpulan juga adalah proses analisis data, karena itu setelah data dikumpulkan maka sesungguhnya

sekaligus peneliti sudah melakukan analisis.

Adapun untuk menguji keabsahan data hasil penelitian, peneliti melakukan triangulasi dengan mengkonfirmasi data kepada beberapa nara sumber atau informan.

Dari sekian banyak cara menguji keabsahan data, peneliti menilai bahwa triangulasi sangat efektif untuk melihat dan mengukur validitas data lapangan. Misalnya, melakukan triangulasi terhadap data (wawancara) sesama tokoh agama, juga pandangan tokoh agama, tokoh adat dengandata dari pihak kepolisian Kalimantan Barat. Pada sesi yang berbeda, peneliti melakukan triangulasi pendapat dan data dosen IAIN saat FGD dengan hasil penelitian di perguruan Tinggi lainnya. Peneliti juga menguji data hasil penelitian dosen Univeritas Tanjung Pura dengan penelitian yang dilakukan dosen IAIN Pontianak.

Ini semua dilakukan untuk menyajikan data penelitian secara serius, terukur dan bertanggung jawab.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Pelintiran Kebencian**

Sesungguhnya strategi pelintiran kebencian hanyalah persoalan teknis dalam politik pertikaian. Wirausahawan politik

sebagai pihak yang berkepentingan mampu memobilisasi masyarakat dengan isu ketimpangan, ketidakadilan yang diframing sebagai pihak musuh.

Untuk memuluskan langkahnya, pihak-pihak ini melakukan pembingkai kultural dan intervensi kognitif (George, 2017). Framing isu ketidakadilan, ketimpangan, marginalisasi sangat efektif untuk mobilisasi masyarakat mendukung wirausahawan politik ini. Bingkai ini ternyata mampu meyakinkan masyarakat bahwa telah terjadi pelanggaran serius yang dilakukan pihak tertuduh tersebut. Tentunya, merugikan, melanggar kepentingan dan nilai mereka (William Gamson dalam George, 2017).

Kelompok ini selalu memosisikan sebagai kaum marginal karena dominasi penguasa. Umumnya mereka merasa sebagai kaum tertindas, didzalimi oleh penguasa. Dominasi politik, monopoli ekonomi dan sosial menempatkan kelompok ini sebagai kaum tidak berdaya.

Upaya pelintiran kebencian ini mampu mempengaruhi pemikiran, sikap dan perilaku masyarakat untuk merespon situasi negative ini. Kondisi psikologi ini membesar bak bola salju, menghimpun spirit solidaritas untuk

melakukan perlawanan dengan berbagai macam metode.

Beberapa contoh peristiwa di belahan dunia lainnya menggambarkan bahwa kasus-kasus kultural dan agama dapat dijadikan pemicu (*trigger*) terbangunnya solidaritas kelompok. Simbol-simbol ketidakadilan bisa bertahan lama seperti kasus Holokaus bagi orang Yahudi, namun banyak juga yang berlaku sebentar. Ilmuan Politik Thomas Olesen (George, 2017) menghasilkan kesimpulan serupa dalam studinya, ketika dia membahas insiden-insiden seperti publikasi kartun nabi Muhammad dan skandal tahanan Teluk Guantanamo. Dia berargumen bahwa kedua peristiwa itu dimanfaatkan sebagai symbol ketidakadilan transnasional.

Amerika Serikat dikenal sebagai negara demokratis telah terjadi ujaran kebencian yang dilakukan unsur-unsur keagamaan sayap kanan. Kelompok ini mengobarkan ancaman terhadap muslim dan menyebarkan berita kebencian anti muslim ke pentas politik arus utama.

Bagaimana dengan India? Pelintirana kebencian juga dilakukan kelompok nasionalis Hindu. Pendukung radikal Narendra Modi memantik kebencian dan kekecauan

komunal dan dan penyensoran atas karya-karya akademis dan seni demi kepentingan mereka

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar juga mendapatkan sorotan, di mana telah terjadi pelintiran kebencian yang dilakukan oleh muslim garis keras, dengan cara mem-*pressure* terhadap kelompok minoritas.

George mensitir bahwa perkembangan internet dan google telah mempercepat pelintiran kebencian yang menysasar masyarakat. Pelaku pelintiran atau ujaran kebencian menggunakan media sosial untuk menyerang kelompok lain. Misalnya menggunakan media *facebook*, *youtube*, diframing dengan ujaran kebencian. Hal ini dilakukan untuk mempermalukan pihak yang dibenci.

Bentuk ujaran kebencian yang banyak dilakukan di media online tersebut adalah penghinaan, penghasutan, provokasi politik, pencemaran nama baik, penistaan agama dan penyebaran berita bohong (*hoax*). Bentuk ujaran kebencian yang paling banyak dilakukan masyarakat ujaran kebencian penistaan agama (Junita, 2018). Misalnya banyak ditemukan komentar pembaca surat kabar online *Tribunnews.com* berupa

penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi dan menghasut (Linawati, 2017).

Perkembangan teknologi dan informasi dengan symbol internet dan google dimanfaatkan kelompok pelinter kebencian untuk mensegerakan dan memobilisasi kebencian, kemarahan dan emosi terhadap kelompok yang disasar. Dampaknya, masyarakat yang berdomisili jauh dari wilayah “pertikaian” juga merasakan provokasi melalui internet dan google tersebut.

## **2. Rekayasa Ketersinggungan**

George menunjukkan bahwa pelintiran kebencian merupakan teknik berpolitik bermata dua yakni mengkombinasikan dua hal yakni ujaran kebencian dan rekayasa ketersinggungan (menampilkan kemarahan yang direkayasa) yang digunakan untuk menyerang lawannya. Strateginya adalah dengan berpura-pura merasa tersinggung, satu pihak menyudutkan lawan politiknya. Upaya ini dilakukan untuk mengumpulkan solidaritas masyarakat dan memprovokasi kemarahan massa, untuk menyerang pihak lawan yang berbeda secara politik. Akibatnya,

terjadi kekerasan yang dilakukan kelompok satu terhadap kelompok lainnya.

Pelintiran kebencian (baca:rekayasa ketersinggungan) ini merupakan upaya yang dilakukan dengan cara melakukan penghinaan, tuduhan, dan ketersinggungan yang didesign atau sengaja diciptakan sebagai rekayasa atau strategi politik yang menggunakan identitas kelompok etnik atau agama untuk menyerang lawan politik.

Dalam konteks Kalimantan Barat, peristiwa ketersinggungan yang bermuara pada kemarahan, hingga berujung pada pertikaian berulang kali terjadi, melibatkan beberapa kelompok etnik dan kelompok organisasi keagamaan. Mereka bersitegang terhadap beberapa masalah seperti ketersinggungan atas persoalan testimoni tentang pandangan keagamaan yang dinilai menciderai rasa keragaman di Kalimantan Barat, sikap terhadap kelompok etnik dan kelompok agama lain hingga pada tindakan kekerasan atas nama etnik dan agama.

Dalam perspektif “pelintiran kebencian”, wirausahawan politik ini telah merekayasa berbagai isu etnik dan agama, sehingga kebencian dan

ketegangan muncul di dalam masyarakat Kalimantan Barat. Isu ini selalu dipelihara, dengan menggunakan bahasa penghinaan terhadap kelompok lain, membahayakan kerukunan di Kalimantan Barat dan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Beberapa peristiwa ketersinggungan antara kelompok etnik dan agama di masyarakat kerap terulang sejak beberapa tahun belakangan yakni tahun 2017, sebelum Pemilu pada di Kalimantan Barat maupun pada saat pelaksanaannya Tahun 2018.

Peristiwa “pelintiran kebencian” yang dilakukan “wirausahawan politik” telah mampu memposisikan tokoh muslim (wasekjen MUI), FPI dan Gubernur Kalimantan Barat serta Dewan Adat Dayak (DAD) Sintang saling berhadapan dan bersitegang persoalan isu etnik, agama dan kerukunan serta nasionalisme (NKRI). Bahkan yang memprihatinkan kelompok ini telah menjadi “korban” kepentingan politik dan ekonomi wirausahawan politik ini.

Peristiwa pertama berawal adanya pelarangan terhadap tokoh muslim yang juga wasekjen MUI Pusat, Teuku Zulkarnaen oleh sejumlah ormas Dewan Adat Dayak (DAD) Sintang pada tanggal 12

*Ismail Ruslan:*

PELINTIRAN KEBENCIAN (*HATE SPIN*):

*Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian Melalui Identitas Agama dan Etnik di Kalimantan Barat*

Januari 2017. Kedatangan tokoh agama ini dalam rangka memberikan tabligh akbar di beberapa kabupaten yakni Kabupaten Sintang, Sanggau, Melawi dan Sekadau<sup>14</sup>.

Dalam video dan foto yang beredar luas dan sangat cepat kepada masyarakat, DAD Sintang melakukan “penolakan” tepat di bawah tangga pesawat garuda yang ditumpangi Tengku dan rombongan. Akibatnya wakil sekjen MUI Pusat ini tidak bisa keluar dari pesawat, dan akhirnya kembali melanjutkan penerbangan ke Kota Pontianak.

Peristiwa yang kedua, penolakan kedatangan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ustadz Ahmad Soebrie Lubis dan Ustadz Hidayah Quaiandri Batangtaris beserta rombongan di Kota Pontianak. Sedianya, kedua ustadz ini akan mengisi tabligh akbar di Kabupaten Mempawah berangkat dari Jakarta menggunakan Lion Air JT 716 jumat pukul 20.00<sup>15</sup>.

Setibanya di bandara Supadio Kota Pontianak, rombongan Ustadz

Ahmad Soebrie Lubis turun dari pesawat, namun dengan pertimbangan keamanan wilayah pihak Polresta dan Kodim 1207/BS, Brimobda Kalbar dan Kasi Intel Lanud Supadio, kedua ustadz ini langsung dipulangkan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Citilink jumat malam.

Melalui *Fanpagenya*, FPI menyatakan “Siapa yang intoleran, kami atau kalian? Baru saja KH Achmad Soebrie Lubis Ketua Umum FPI ditolak dan dipaksa kembali ke Jakarta, saat mendarat di Supadio dalam rangka tabligh Akbar atas undangan masyarakat Kalbar.

Peristiwa ketiga, terjadi satu hari setelah penolakan kunjungan ketua FPI ke Kalimantan Barat (6 Mei 2017). Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis ditolak kehadirannya di Provinsi Aceh pada saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka peringatan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke 15 tahun 2017 yang diselenggarakan di Aceh<sup>16</sup>.

Penolakan ini dilatarbelakangi, sikap Cornelis yang menolak kedatangan pimpinan Front Pembela Islam ke Kalimantan Barat, bahkan

---

<sup>14</sup> Tempo.co, “Teuku Zulkarnaen Di Tolak Warga Dayak, Ini Respon MUI Kalbar,” Kamis, 12 Januari 2017 18:12 WIB, 2017.

<sup>15</sup> Kalbar Online, “Ketua FPI Dilarang Tabligh Akbar Di Pontianak Dan Dipulangkan, Mana Katanya Toleran Dan Bhineka?,” 07/05/2017, 2017.

---

<sup>16</sup> Rappler.com, “Gara-Gara Tolak Kehadiran Anggota FPI, Gubernur Kalbar Diusir Di Aceh,” 6 Mei 2017, 2017.

spanduk ukuran besar sudah terbentang beberapa hari sebelumnya untuk menyambut kedatangan Rizieq.

Peristiwa yang keempat, adalah aksi bela ulama 205 yang dilakukan di Kota Pontianak, pada tanggal 20 Mei 2017. Muslim Kota Pontianak melakukan aksi ini sebagai bentuk pembelaan terhadap ulama yang ditolak kehadirannya di Kalimantan Barat. Penolakan terhadap Tengku Zulkarnaen (12 Januari 2017) di Kabupaten Sintang yang akan melaksanakan tabligh akbar di beberapa kabupaten. Penolakan yang kedua adalah terhadap ketua Umum FPI Ustadz Ahmad Soebrie Lubis dan Ustadz Hidayah Quaiandri Batangtaris beserta rombongan di Kota Pontianak, 5 Mei 2017.

Aksi bela Ulama ini juga menuntut kepada pihak kepolisian untuk memproses laporan terhadap Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis. “Kami tidak memusuhi orang Dayak, karena mereka saudar. Tapi kami minta keadilan untuk memproses Cornelis”.

Aksi ini bersamaan dengan Gawai Dayak sebagai kegiatan kebudayaan tahunan di Provinsi Kalimantan Barat. Festival ini adalah upacara panen padi yang berpusat di Rumah “Radnk”. Festival ini

mengundang masyarakat luar negeri seperti Amerika Serikat, Australia, New Zeland, Polandia, Taiwan, rumpun Suku Dayak di Malaysia, dan Brunai Darussalam<sup>17</sup>.

Kedua peristiwa tersebut yakni aksi Belan Ulama 205 dan Pekan Gawai Dayak yang dilaksanakan bersamaan, membuat kota Pontianak Siaga 1. Untuk menjaga keamanan di Pontianak, Polda Kalbar mendapat bantuan Brimob Kelapa dua sebanyak 200 personil.

Dalam perspektif “pelintiran kebencian” beberapa peristiwa di atas mengindikasikan adanya suatu rekayasa dari kelompok “wirausahawan politik” melakukan rekayasa ketersinggungan terhadap tokoh-tokoh muslim, FPI dan Gubernur Kalimantan Barat serta kelompok Dayak (DAD) Sintang.

Selanjutnya, wirausahawan politik inilah yang telah merekayasa ketersinggungan dengan menampilkan isu-isu etnik dan agama untuk memicu kemarahan masyarakat, dan kelompok yang bertikai.

Strateginya adalah dengan berpura-pura merasa tersinggung, dengan cara satu pihak menyudutkan

---

<sup>17</sup> Tempo.co, “Aksi Bela Ulama 205 Kisruh, Pontianak Berstatus Siaga,” 20 Mei 2017, 2017.

pihak lainnya. Upaya ini dilakukan untuk mengumpulkan solidaritas umat Islam, FPI dan kelompok Dayak di Sintang dan memprovokasi kemarahan masa. Targetnya adalah pihak-pihak yang saling berhadapan ini terprovokasi dan melakukan kekerasan satu dengan lainnya. Strategi ini dilakukan untuk mengumpulkan solidaritas diantara kelompok agar menyerang kelompok lainnya yang berbeda pandangan, dan sikap politik. Perselisihan ini ibarat bola salju, semakin membesar dan merusak kerukunan, persatuan antar kelompok masyarakat.

Kesiagaan aparat kepolisian, TNI dan peran tokoh agama telah mampu mengendalikan kemarahan, dan ketersinggungan kelompok yang bertikai ini. Sehingga konflik di Kalimantan Barat yang pernah terjadi beberapa kali tidak terulang lagi.

### **3. Ujaran Kebencian**

Pada periode pemilihan kepala daerah seperti pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat masyarakatnya sangat banyak terpengaruh pada ujaran kebencian. Gerakan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan pengaruh masifnya ujaran kebencian dipublis

dengan tidak bertanggung jawab di media masa, internet dan google.

Secara psikologi gerakan masyarakat Kalimantan Barat membuktikan bahwa ujaran kebencian dan keterhasutan ibarat dua sisi mata uang. Isu marginalisasi, ketidakadilan yang diusung “wirausahawan politik” yang memainkan ujaran kebencian mampu memobilisasi kebencian masyarakat Kalbar antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Keburukan pelintiran kebencian mampu menggerakkan masyarakat yang merasa tertindas (George, 2017).

Pelintiran dan ujaran kebencian mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang sangat negative tentang suatu kelompok, atau perwakilan kelompok, dimana kelompok didefinisikan dengan penanda identitas, seperti ras, agama dan orientasi seksual. Penistaan hanya akan disebut ujaran kebencian ketika ditujukan kepada kelompok-kelompok rentan. Ujaran kebencian yang menyasar kelompok minoritas harus diartikan sebagai kelompok yang tidak diuntungkan atau tertindas.

Dalam konteks Indonesia dan Kalimantan Barat, pada tahun 2018 Kepolisian Indonesia telah menangkap 122 orang terkait ujaran kebencian di media sosial. Setidaknya ada 3.000

akun di media sosial dideteksi Polri secara aktif menyebar ujaran kebencian di media social<sup>18</sup>.

Ada lima jenis kejahatan mulai dari hoaxes, berita bohong, berita palsu, penistaan agama, hingga pencemaran nama baik. Misalnya berita hoax *rush money* di Jakarta, ada ajakan kepada umat Islam untuk menarik uangnya di Bank jika Ahok atau Basuki Tjahaya Purnama jadi tersangka kasus penistaan agama<sup>19, 20</sup>.

Kasus yang menunjukkan berita bohong, misalnya pada bulan Oktober tahun 2019, aktivis nasional Ratna Sarumpet dilaporkan oleh beberapa pengacara karena telah menyebarkan berita bohong atas penganiayaan dirinya<sup>21, 22</sup>.

Seorang warga Agung Zulianto, melaporkan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo ke Polda

Metro Jaya atas dugaan berita bohong<sup>23, 24</sup>.

Dugaan penistaan agama juga dapat masuk ranah pidana, seperti kasus tokoh nasional, Rocky Gerung juga pernah dilaporkan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Permadi Arya karena telah melakukan ujaran kebencian. Rocky Gerung dilaporkan karena menyebut Kitab Suci sebagai fiksi di acara TV Swasta<sup>25, 26</sup>.

Ahmad Dhani dilaporkan oleh Koalisi Pembela NKRI atas kasus pencemaran nama baik. Dhani dalam vlognya meminta maaf kepada masa aksi 2019 Ganti Presiden karena tidak bisa keluar dari hotel, karena dihadang oleh pendemo pro pemerintah. Dhani mengucapkan kata idiot dalam dalam videonya.<sup>27</sup>

Pelintiran atau ujaran kebencian juga terjadi di Kalimantan Barat. Sepanjang tahun 2018 ujaran kebencian *hate Speech* mengalami peningkatan di bumi khatulistiwa. Bentuk pelintiran atau ujaran

<sup>18</sup> Abba Gabrilin, "Selama 2018 Polisi Tangkap 122 Orang Terkait Ujaran Kebencian," Kompas.com 15/02/2019, 15:47 WIB, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/15/15471281/selama-2018-polisi-tangkap-122-orang-terkait-ujaran-kebencian-di-medsos>.

<sup>19</sup> Abba Gabrilin.

<sup>20</sup> Berita hoax di masyarakat tahun 2016

<sup>21</sup> Hestiana Dharmastuti, "Perjalanan Kasus Ratna Sarumpet Hingga Bebas Hari Ini," Detiknews 26/12/2019, 2019.

<sup>22</sup> Berita Bohong tahun 2019

<sup>23</sup> Tim Detikcom; Detiknews, "Jubir KPK-Koordinator ICW Dilaporkan Ke Polisi Soal Dugaan Berita Bohong," Detiknews, 2019.

<sup>24</sup> Berita Bohong atau palsu

<sup>25</sup> Ronald, "Ketua Cyber Indonesia Laporkan Rocky Gerung Ke Polda Metro," Liputan6.com, 2018,

<https://www.liputan6.com/news/read/3446235/ketua-a-cyber-indonesia-laporkan-rocky-gerung-ke-polda-metro>.

<sup>26</sup> Kasus Penistaan Agama tahun 2019

<sup>27</sup> Pencemaran nama baik

kebencian yang banyak dilakukan adalah penghinaan, penghasutan, provokasi politik, pencemaran nama baik, penistaan agama dan penyebaran berita bohong (*hoax*). Bentuk ujaran kebencian yang paling banyak dilakukan masyarakat ujaran kebencian penistaan agama.

Kepolisian Kalbar merilis sepanjang tahun 2018 telah terjadi 37 laporan berupa ujaran kebencian. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 yang berjumlah 19, artinya mengalami peningkatan hingga 94%.

Bentuk ujaran kebencian yang terdapat di dalam komentar pembaca surat kabar online *Tribunnews.com* berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi dan menghasut.

Contoh Kasus dugaan ujaran kebencian di Kalimantan Barat oleh Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) Isa Anshari terhadap Gubernur Kalimantan Barat, 2019<sup>28,29</sup>.

Seorang Kepala Sekolah di Kayong Utara, FSA, menyebut bom

Surabaya yang terjadi di tiga gereja sebagai rekayasa, di *facebooknya*<sup>30 31</sup>.

Kasus SHU diduga membagikan, menyebarkan dan memposting seorang pejabat Kabupaten Sanggau yang bermuatan ujaran kebencian, melalui facebook<sup>32</sup>.

Kasus ujaran kebencian umumnya dilakukan menggunakan media masa seperti *facebook*, *Whats App* dan media onlie lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pengguna media sosial belum mampu mengelola secara positif perkembangan teknologi informasi. Idealnya, segala yang terkait dengan revolusi industry 4.0, mampu digunakan secara positif dan produktif. Namun faktanya, masyarakat larut dalam eforia keterbukaan dan kebebasan berpendapat, yang berujung pada pidana.

Dalam beberapa tahun (2015-2017) telah terjadi banyak laporan kasus ujaran kebencian di Kalimantan Barat. Dalam penegakan hukum seringkali ditemukan ketidakseimbangan dalam penanganan sebuah

<sup>28</sup> *Tribun Pontianak.co.id*, "Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) Isa Anshari Terhadap Gubernur Kalimantan Barat, 2019, 9 Oktober 2019," 09 Oktober 2019, 2019.

<sup>29</sup> Ujaran Kebencian tahun 2019

<sup>30</sup> *Tribunsolo.com*, "Kepala SMP Di Kayong Utara Ini Ditahan Dan Diberhentikan Karena Sebut Bom Surabaya Rekayasa," 2018.

<sup>31</sup> Ujaran kebencian tahun 2019

<sup>32</sup> *Tim Detikcom; Detiknews*, "Sebar Kebencian Di Facebook, Warga Kalbar Ditangkap," 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4385113/sebar-kebencian-di-facebook-warga-kalbar-ditangkap>.

perkara oleh penyidik/penyelidik di institusi kepolisian<sup>33</sup>.

Kurangnya filter terhadap informasi yang berkembang mengakibatkan kecemasan masal, akan berdampak terjadinya benturan kepentingan (*conflik of interes*) pada masyarakat<sup>34</sup>.

CNN Indonesia menyebut bahwa Kementerian Komunikasi dan Informasi menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (*hate speech*).

Pada tahun 2016, Keminfo telah memblokir 773 ribu situs berdasarkan pada sepuluh kelompok, mengandung unsur pornografi, SARA, penipuan/dagang ilegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan, anak, keamanan internet, dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)<sup>35</sup>.

Kalangan akademisi memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan tema-tema kebangsaan dan keummatan

kepada masyarakat. Hal ini penting dilakukan karena masyarakat berada dalam situasi “psikologi permusuhan, kebencian antara satu dengan lainnya.

#### 4. Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian

Peristiwa Pemilukada di Kalimantan Barat penuh dengan rekayasa ketersinggungan, ujaran kebencian dan permusuhan dengan mengusung isu etnik dan agama sebagai jargon politik. Tujuannya pasti kemenangan dan kekuasaan politik.

Tokoh agama, tokoh etnis dan akademis masih ada yang tidak terlalu peduli dengan persoalan-persoalan ini. Sehingga politik identitas semakin menguat, menggelinding membesar dan memakan korban.

Polarisasi etnis dan agama telah menjerumuskan masyarakat Kalimantan Barat pada pikiran, sikap dan perilaku primordialisme. Dampaknya muncul testimony: “Calon dari agama dan etnis kami layak memimpin”.

Pasca pilkada, situasi kejiwaan seperti kebencian, permusuhan masih sangat membekas, sulit disembuhkan. Bilamana muncul kasus yang “dinilai melecehkan, atau menghina” etnis dan agama, maka luka ini akan kembali terbuka lagi.

<sup>33</sup> Anshari Anshari and M. Fajrin, “Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Oleh Penyidik/ Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Kalimantan Barat),” *Res Judicata* 1, no. 2 (2019): 140, <https://doi.org/10.29406/rj.v1i2.1237>.

<sup>34</sup> Anshari and Fajrin.

<sup>35</sup> Fauzan Jamaluddin, “773 Ribu Situs Di Blokir Kemkoinfo Setahun, Pornografi Paling Banyak,” *Merdeka.Com*, 2016, <https://www.merdeka.com/teknologi/773-ribu-situs-diblokir-kemkoinfo-setahun-pornografi-paling-banyak.html>.

Kurangnya filter terhadap informasi yang berkembang mengakibatkan kecemasan massal, akan berdampak terjadinya benturan kepentingan (*conflik of interes*) pada masyarakat.

Tokoh agama, tokoh masyarakat dan akademisi wajib memotivasi masyarakat agar berpikir, bersikap dan bertindak positif. Semua ajaran agama memberikan tuntunan sangat penting menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akherat<sup>36</sup>.

Perguruan Tinggi, memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan tema-tema kebangsaan dan ke Indonesiaan kepada masyarakat luas termasuk di Kalimantan Barat. Espektasi masyarakat Kalbar sangat tinggi terhadap akademisi sebagai pelopor moderasi beragama dan etnik, sehingga Kalimantan menjadi wilayah damai dan aman<sup>37; 38; 39; 40</sup>.

Walaupun masih ada sebagian kecil civitas akademika juga terlibat dalam permainan politik identitas, memproduksi ujaran kebencian terhadap kelompok yang berbeda ideologi.

Ujaran kebencian di media sosial juga masuk pada ranah kebijakan pemerintah Pusat dan Kalimantan Barat. Berbagai macam cemooh, cibiran, meme negative dilayangkan kepada pengambil kebijakan, termasuk kebijakan pemerintah melahirkan program penanganan radikalisme dan terorisme.

Bahkan yang membuat kita prihatin, peristiwa bom di Indonesia oleh satu keluarga dinilai rekayasa pemerintah (baca: aparat kepolisian). Seorang kepala sekolah di Kayong Utara Kalimantan Barat, yang menilai bahwa bom Surabaya rekayasa aparat

<sup>36</sup> Tuntunan menjaga keseimbangan termaktub di dalam alquran Surah Al-Qashash ayat 77 Berbunyi: *Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu (kebahagian) negeri akherat, dan jangan kamu lupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

<sup>37</sup> Yusriadi Yusriadi, Ismail Ruslan Ismail Ruslan, and Hariansyah Hariansyah, "NARASI KEBAHAN SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK PADA MASYARAKAT NANGA PINOH, MELAWI," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 4, no. 1 (2018): 15–26, <https://doi.org/10.18784/smart.v4i1.583>.

<sup>38</sup> Joko Tri Haryanto, "NILAI KERUKUNAN PADA CERITA RAKYAT DAYUHAN-INTINGAN DI KABUPATEN TAPIN KALIMANTAN SELATAN," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 4, no. 1 (2018): 1–14, <https://doi.org/10.18784/smart.v4i1.598>.

<sup>39</sup> Yustiani Yustiani, "NASIONALISME MELALUI PENDIDIKAN DI SEKOLAH PADA SISWA SMA DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 4, no. 1 (2018): 111–23, <https://doi.org/10.18784/smart.v4i1.578>.

<sup>40</sup> Ismail; Yusriadi Yusriadi Ruslan, "KELOMPOK LAIN ' DALAM PANDANGAN PELAJAR DI WILAYAH BEKAS KONFLIK DI SANGGAU LEDO ," *Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Dakwah* 13, no. 2 (2019): 307–18.

kepolisian. Testimoni kepala sekolah ini di media masa berbuntut panjang, yang bersangkutan ditangkap pihak kepolisian karena menyampaikan fitnah dan ujaran kebencian terhadap pemerintah (kepolisian Indonesia).

Pelintiran dan ujaran kebencian “wirausahawan politik” tidak hanya berdampak menguatnya solidaritas sosial kelompok untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Namun juga berujung pada tindakan pidana dan politik kebangsaan. Misalnya, dunia pendidikan yang terdiri dari guru, siswa<sup>41</sup> banyak terparap intoleran dan gerakan radikal<sup>42</sup>. Hal ini sangat berbahaya karena akan mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

Bahkan beberapa tahun belakangan ini terjadi ledakan bom di Indonesia. Pada tahun 2019 terjadi di beberapa tempat seperti, bom Sibolga, bom pos polisi Kartasura, penyerangan di Polsek Wonokromo. Kondisi ini memperlihatkan kepada kita, bahwa proses radikal

(radikalisme) terus terjadi di masyarakat, meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai langkah-langkah.

Pelaku kekerasan dengan bom, sudah mengubah metodenya tidak lagi dengan cara konvensional namun sudah dengan cara modern yakni dengan memanfaatkan teknologi internet dan sosial media.

Penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menemukan guru di Indonesia mulai tingkat TK/RA hingga SMA/MA memiliki intoleran dan radikal yang tinggi. Secara umum di atas 50% guru memiliki opini intoleran. Sebanyak 46,09% memiliki opini radikal (18 Oktober 2018).

Survey terkini Wahid Institut, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, dan dan Setara Institute menemukan bahwa terjadinya penyebaran ajaran intoleran dan paham radikalisme di lembaga pendidikan di Indonesia.

Penelitian BNPT 2017 menemukan bahwa kearifan lokal dan kesejahteraan masyarakat merupakan daya tangkal yang paling kuat terhadap paparan radikalisme di masyarakat.

<sup>41</sup> Abdul Munip, “Menangkal Radikalisme Agama Di Sekolah,” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2012): 159, <https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.159-181>.

<sup>42</sup> Abu Rokhmad, “RADIKALISME ISLAM DAN UPAYA DERADIKALISASI PAHAM RADIKAL,” *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2012): 79, <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.185>.

Artinya, masyarakat yang sudah terinternalisasi dengan kearifan lokal dan masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan yang baik lebih tahan terhadap paparan radikalisme.

Pada tahun 2018, BNPT melakukan research untuk memperdalam tentang kearifan lokal sebagai daya tangkal. Penelitian ini menemukan bahwa kearifan lokal efektif menangkal potensi radikalisme di masyarakat, khusus pada katagori akademisi di perkotaan. Problemnya, adalah pengetahuan dan internalisasi kearifan lokal di masyarakat masih rendah.

Penelitian lain di tahun 2018, menunjukkan bahwa terjadi diskontinuitas pemahaman dan praktek tradisi kearifan lokal dari generasi milenial ke generasi milenial, cenderung tidak mengetahui.

Penelitian BNPT tahun 2019 tentang pola pendidikan keluarga pada anak dan desiminasi sosial media menemukan beberapa fakta. Desiminasi social media memiliki pengaruh paling besar dalam mereduksi potensi radikalisme.

Research BNPT tersebut memperkuat espektasi masyarakat terhadap peran Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Agama untuk

ikut menyampaikan pesan-pesan kebangsaan kepada generasi muda (kaum millennial). Pengaruh ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila sudah masuk dan mencuci otak generasi muda Indonesia<sup>43</sup>.

Secara hukum pemerintah sudah melarang organisasi tersebut, seperti TAP MPRS NOMOR 25 TAHUN 1966 Tentang Pembubaran PKI sebagai organisasi terlarang. PKI menyebarkan paham Komunisme, Leninisme, dan Marxisme, bertentangan dengan Pancasila.

PERPU NO 2 TAHUN 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Keputusan Pemerintah tanggal 19 Juli 2017, HTI terbukti berkeinginan mengubah negara Pancasila menjadi khilafah. Walaupun secara resmi, HTI sudah dibubarkan, namun aktifitasnya masih terasa hingga saat ini.

Derrida (1993) dalam bukunya *Specter of Marx*, menjelaskan ideologi-ideologi di dunia tidak akan pernah mati melainkan bersembunyi dan melatankan diri<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Kamarullah; Abdul Mukti Rouf; Mohamad Nabil, *Narasi Dan Politik Identitas: Pola Penyebaran & Penerimaan Radikalisme & Terorisme Di Pontianak, Kalimantan Barat*. (Pontianak: FKPT Kalimantan Barat, 2014).

<sup>44</sup> Jacques Derrida, "Spectres of Marx: The State of Debt, the Work of Mourning and the New International," *New Left Review* 205 (2006): 31–58.

Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (2011) di lima Universitas ternama, UGM, UI, IPB, UNAIR dan UNDIP menunjukkan peningkatan pemahaman konservatif dan fundamentalisme keagamaan, khususnya di kalangan mahasiswa di kampus-kampus.

Kita wajib memperhatikan persoalan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keinginan sebagian kecil orang atau kelompok untuk mendirikan negara khilafah adalah sangat bertentangan dengan semangat kebangsaan dan nasionalisme serta *ahistory*.

Indonesia harus belajar dari negara Super power Uni Soviet yang menjadi negara gagal, terpecah belah menjadi beberapa negara. Afganistan, satu agama, satu mazhab namun konflik antara kelompok telah berlangsung selama puluhan tahun. Banyak lagi negara-negara di Timur Tengah berada di ujung tanduk untuk menjadi negara gagal.

Perdebatan tentang dasar negara, Pancasila, dan bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan sudah final sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Jika ada sekelompok orang atau organisasi yang ingin mengubah pancasila maka ia telah

melanggar kesepakan suci (*mitsaqan ghaliza*) anak bangsa dan tidak sejalan dengan sejarah bangsa Indonesia, Piagam Jakarta.

Pancasila bukan agama, dan tidak akan pernah menggantikan posisi agama. Nilai-nilai agama terinternalisasi dalam Pancasila. Seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda agama dan berbeda etnik menerima Pancasila sebagai titik temu. Para ulama menyebut Pancasila sebagai *Kalimatun Sawa* (titik temu).

## KESIMPULAN

Pelintiran kebencian itu merupakan teknik berpolitik para wirausahawan politik yang memadukan dua sisi yakni rekayasa ketersinggungan dan ujaran kebencian. Keduanya aspek ini memiliki daya serang yang dahsyat untuk menghancurkan lawan politiknya.

Di beberapa negara pelintiran kebencian mampu membinasakan pemerintah yang sedang berkuasa, dengan dalil telah terjadi deskriminasi, marginalisasi, ketidakadilan. Bahkan witausahawan politik ini mampu memainkan isu etnik dan agama untuk menggebuk musuh politik hingga tersungkur dan tidak berdaya.

Bahkan pelintiran kebencian yang mengusung isu etnik dan agama mampu

*Ismail Ruslan:*

PELINTIRAN KEBENCIAN (*HATE SPIN*):

*Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian Melalui Identitas Agama dan Etnik di Kalimantan Barat*

membuat polarisasi di dalam masyarakat atas nama etnik dan agama tersebut.

Broker Pelintiran Kebencian menilai bahwa etnik dan agama sebagai isu strategis dapat digunakan memobilisasi dukungan politik dan kepentingannya. Untuk menyampaikan kebencian tersebut, mereka menggunakan media sosial yang efektif mampu mempengaruhi masyarakat.

Sesuatu yang memprihatinkan adalah getarannya sangat dirasakan oleh masyarakat di wilayah lain, yang tidak mengalami pergolakan politik tersebut. Situasi psikologis wilayah pergolakan politik juga merambah di wilayah lainnya, dan mampu membelah masyarakat atas nama etnik dan agama.

Wilayah yang awalnya damai, rukun, berubah menjadi medan perang baru. Terjadi kekerasan politik di dalam masyarakat atas nama etnik dan agama. Situasi ini merugikan masyarakat, karena mereka menjadi korban, harga benda, hingga nyawapun hilang. Sesuatu yang lebih serius adalah ancaman baik keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

Abba Gabrilin. "Selama 2018 Polisi Tangkap 122 Orang Terkait Ujaran Kebencian." *Kompas.com* 15/02/2019, 15:47 WIB, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/201>

9/02/15/15471281/selama-2018-polisi-tangkap-122-orang-terkait-ujaran-kebencian-di-medsos.

Anshari, Anshari, and M. Fajrin. "Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Oleh Penyidik/ Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Kalimantan Barat)." *Res Judicata* 1, no. 2 (2019): 140. <https://doi.org/10.29406/rj.v1i2.1237>.

Charian George. *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama Dan Ancaman Bagi Demokrasi*. Edited by Ihsan Ali-Fauzi; Irsyad Rafsadie. Jakarta: Pusad Paramadina, 2017.

Derrida, Jacques. "Spectres of Marx: The State of Debt, the Work of Mourning and the New International." *New Left Review* 205 (2006): 31–58.

Fauzan Jamaluddin. "773 Ribu Situs Di Blokir Kemkoinfo Setahun, Pornografi Paling Banyak." *Merdeka.Com*. 2016. <https://www.merdeka.com/teknologi/773-ribu-situs-diblokir-kemkoinfo-setahun-pornografi-paling-banyak.html>.

Halim, Abdillah. "Fatwa Dan Politisasi Agama (Analisis Wacana Penggunaan Fatwa Pada Pilkada DKI Jakarta)." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya & Sosial* Vol. 5, no. 2 (2018): 231–59. <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/272/108>.

Haryanto, Joko Tri. "NILAI KERUKUNAN PADA CERITA RAKYAT DAYUHAN-INTINGAN DI KABUPATEN TAPIN KALIMANTAN SELATAN." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 4, no. 1 (2018): 1–14.

- <https://doi.org/10.18784/smart.v4i1.598>.
- Hestiana Dharmastuti. "Perjalanan Kasus Ratna Sarumpet Hingga Bebas Hari Ini." *Detiknews* 26/12/2019, 2019.
- Jati, Wasisto Raharjo. "AGAMA DAN POLITIK: TEOLOGI PEMBEBASAN SEBAGAI ARENA PROFETISASI AGAMA." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 133. <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.262>.
- Juditha, Christiany. "Hatespeech Di Media Online: Kasus Pilkada Dki Jakarta 2017." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2017, 137–50.
- Kalbar Online. "Ketua FPI Dilarang Tabligh Akbar Di Pontianak Dan Dipulangkan, Mana Katanya Toleran Dan Bhineka?" 07/05/2017, 2017.
- Kamarullah; Abdul Mukti Rouf; Mohamad Nabil. *Narasi Dan Politik Identitas: Pola Penyebaran & Penerimaan Radikalisme & Terorisme Di Pontianak, Kalimantan Barat*. Pontianak: FKPT Kalimantan Barat, 2014.
- Kurniawan, Budi. "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi." *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 133. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07>.
- Lampe, Ilyas, and Haslinda B. Anriani. "Stereotipe, Prasangka Dan Dinamika Antaretnik." *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 20, no. 1 (2016): 19–32. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v20i1.42>.
- Linawati. "Tindak Tutur Ujaran Kebencian Dalam Komentar Pembaca Pada Surat Kabar Online Tribunnews.Com." *Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 Universitas Negeri Yogyakarta* 6, no. 5 (2017): 606–14. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/bsi>.
- Muhaimin; Junaidi, Ahmad. "Fiqh Santri Dan Politisasi Agama Dalam Bingkai Otonomi Kesatuan." *Jurnal Dakwatuna: Dakwah Dan Komunikasi Islam* 3, no. 2 (2017): 121–46. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/dakwatuna/article/view/280>.
- Munip, Abdul. "Menangkal Radikalisme Agama Di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2012): 159. <https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.159-181>.
- Ningrum, Dian Junita, Suryadi Suryadi, and Dian Eka Chandra Wardhana. "KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL." *Jurnal Ilmiah KORPUS* 2, no. 3 (2019): 241–52. <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>.
- Qurtuby, Sumanto Al. "Sejarah Politik Politisasi Agama Dan Dampaknya Di Indonesia." *Maarif* 13, no. 2 (2018): 43–54. <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.21>.
- Rappler.com. "Gara-Gara Tolak Kehadiran Anggota FPI, Gubernur Kalbar Diusir Di Aceh." 6 Mei 2017, 2017.
- Rokhmad, Abu. "RADIKALISME ISLAM DAN UPAYA DERADIKALISASI PAHAM RADIKAL." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2012): 79. <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.185>.

- Ronald. “Ketua Cyber Indonesia Laporkan Rocky Gerung Ke Polda Metro.” *Liputan6.com*, 2018. <https://www.liputan6.com/news/read/3446235/ketua-cyber-indonesia-laporkan-rocky-gerung-ke-polda-metro>.
- Ruslan, Ismail; Yusriadi Yusriadi. “KELOMPOK LAIN ’ DALAM PANDANGAN PELAJAR DI WILAYAH BEKAS KONFLIK DI SANGGAU LEDO .,” *Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Dakwah* 13, no. 2 (2019): 307–18.
- Sagala, Ivan Devi, and Budi Ali Mukmin Sarumpaet. “Politik Identitas Etnis Dalam Pilkada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2015.” *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 4, no. 1 (2018): 139. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10268>.
- Sirait, Ferdinand Eskol Tiar. “Ujaran Kebencian, Hoax Dan Perilaku Memilih (Studi Kasus Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia).” *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 2 (2020): 179–90. [www.politik.lipi.go.id](http://www.politik.lipi.go.id).
- Syaf, E J. “Pertarungan Simbol Identitas Etnis Sebagai Komunikasi Politik Dalam Pilkada Kota Makassar.” *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2018.
- Tempo.co. “Aksi Bela Ulama 205 Kisruh, Pontianak Berstatus Siaga.” 20 Mei 2017, 2017.
- . “Teuku Zulkarnaen Di Tolak Warga Dayak, Ini Respon MUI Kalbar.” Kamis, 12 Januari 2017 18:12 WIB, 2017.
- Tim Detikcom; Detiknews. “Jubir KPK-Koordinator ICW Dilaporkan Ke Polisi Soal Dugaan Berita Bohong.” *Detiknews*, 2019.
- . “Sebar Kebencian Di Facebook, Warga Kalbar Ditangkap,” 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4385113/sebar-kebencian-di-facebook-warga-kalbar-ditangkap>.
- Tribun Pontianak.co.id. “Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) Isa Anshari Terhadap Gubernur Kalimantan Barat, 2019, 9 Oktober 2019.” 09 Oktober 2019, 2019.
- Tribunsolo.com. “Kepala SMP Di Kayong Utara Ini Ditahan Dan Diberhentikan Karena Sebut Bom Surabaya Rekayasa,” 2018.
- Yusriadi, Yusriadi, Ismail Ruslan Ismail Ruslan, and Hariansyah Hariansyah. “NARASI KEBAHAN SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK PADA MASYARAKAT NANGA PINOH, MELAWI.” *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 4, no. 1 (2018): 15–26. <https://doi.org/10.18784/smart.v4i1.583>.
- Yustiani, Yustiani. “NASIONALISME MELALUI PENDIDIKAN DI SEKOLAH PADA SISWA SMA DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT.” *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 4, no. 1 (2018): 111–23. <https://doi.org/10.18784/smart.v4i1.578>.

